

# OBAT UNTUK SIAPA?

## TRIPS, MONOPOLI OBAT, DAN ANCAMAN FTA TERHADAP AKSES KESEHATAN

### DUNIA DALAM ANGKA

**↑57M 70%**

Tanpa Akses Obat Miskin Karena Biaya Obat

1 dari 3



Pasien di negara berkembang tidak mampu membeli obat dasar.

### APA ITU TRIPS?

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, salah satu pilar perdagangan di bawah WTO, mengatur standar minimal perlindungan kekayaan intelektual

### BAGAIMANA PERJANJIAN TRIPS?

Wilayah yang dilindungi oleh Perjanjian TRIPS, antara lain:

- Hak cipta dan hak yang terkait merek dagang
- Indikasi geografis
- Desain industri
- Paten
- Desain tata letak (topografis) sirkuit terpadu
- Kerahasiaan informasi, termasuk rahasia dagang

untuk menyelaraskan dengan TRIPS, Indonesia harus menyusun beberapa Undang-undang yakni UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU Rahasia Dagang dan dalam FTA TRIPS Plus didorong oleh negara maju yang memperluas monopoli.

### TRIPS & PATEN OBAT

TRIPS memperlakukan obat seperti komoditas lain, sehingga produk farmasi tunduk pada aturan paten yang memberi monopoli penuh kepada pemegang invensi. Dalam skema ini, obat, vaksin, dan alat medis bisa dipatenkan, dengan masa perlindungan hingga 20 tahun. Akibatnya, hanya pemilik paten yang berhak memproduksi, menjual, mengimpor, atau mendistribusikan obat tersebut, sekaligus menentukan harganya. Mekanisme ini membuat akses obat sangat bergantung pada kekuatan eksklusivitas perusahaan pemegang paten.

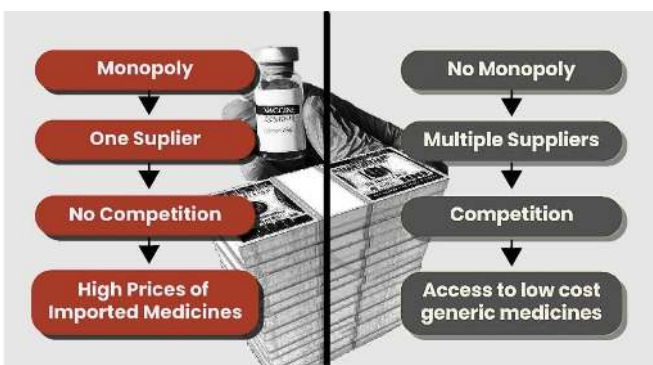
### MONOPOLI OBAT ITU NYATA

**20 Tahun**

Durasi monopoli paten obat di bawah aturan TRIPS.

Pemberian hak monopoli kemudian menyebabkan harga atas obat-obatan menjadi lebih mahal karena kontrol utama (produksi, distribusi, harga) berada di tangan korporasi.

### MONOPOLI VS NO MONOPOLI



### CARA MELAWAN PATEN

Fleksibilitas TRIPS adalah celah legal yang boleh digunakan negara agar akses obat tetap terjamin meskipun ada paten. Setiap negara mengatur fleksibilitas ini dalam UU Paten masing-masing. Bentuknya meliputi pengajuan keberatan sebelum dan sesudah paten diberikan, membuka jalur impor paralel, hingga memberi lisensi wajib atau menggunakan paten untuk kepentingan pemerintah

Sebelum paten terbit, ada pre grant opposition dan post grant opposition, yaitu keberatan publik atau pemerintah terhadap permohonan paten yang dinilai tidak layak. Setelah paten diberikan, negara dapat menggunakan berbagai opsi seperti impor paralel untuk membeli obat yang sama dari negara lain dengan harga lebih murah